

PERANAN KELURAHAN DALAM PEMELIHARAAN SALURAN AIR DI WILAYAH KELURAHAN CIMAH KECAMATAN CIMAH TENGAH KOTA CIMAH

Gita Mutiara R Sunarya¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Judul penelitian ini adalah "Peranan Kelurahan dalam Pemeliharaan Saluran Air di Wilayah Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam mengenai peranan kelurahan Cimahi dalam pemeliharaan saluran air di wilayah kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Masalah utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih banyaknya rumah penduduk di kelurahan Cimahi yang belum memiliki *septic tank* yang layak, di mana tercatat sebanyak 1.697 rumah masih membuang limbah langsung ke saluran air, yang berdampak pencemaran lingkungan dan risiko penyakit seperti diare. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, termasuk wawancara mendalam dengan informan dari pihak kelurahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), dan juga masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Cimahi telah menjalankan peranannya melalui tiga dimensi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peranan kelurahan cimahi sudah berjalan cukup baik dalam aspek regulasi dan fasilitasi, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada kolaborasi aktif dan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Peranan kelurahan, pemeliharaan air, *septic tank*, sanitasi masyarakat.

Abstract

The title of this research is "The Role of Villages in Water Channel Maintenance in Cimahi Village, North Cimahi District, Cimahi City". This research aims to determine, describe, and analyze in depth the role of Cimahi Village in water channel maintenance in Cimahi Village, Central Cimahi District, Cimahi City. The main problem behind this research is that there are still many houses in Cimahi Village that do not have proper septic tanks, where it is recorded that 1,697 houses still dispose of waste directly into the water channels, which has an impact on environmental pollution and the risk of diseases such as diarrhea. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through literature studies and field studies, including in-depth interviews with informants from the Village, the Department of Housing and Settlement Areas (DPKP), and also the local community. Data analysis is carried out

through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that Cimahi Village has carried out its role through three main dimensions, namely as a regulator, dynamicator and facilitator. The conclusion of this study is that the role of the Cimahi sub-district has been running quite well in terms of regulation and facilitation, but its effectiveness still depends heavily on active collaboration and changes in community behavior in maintaining the cleanliness of water channels in a sustainable manner.

Keywords: *The role of sub-districts, water maintenance, septic tanks, community sanitation*

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan salah satu instrumen negara yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal, karena sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada dasarnya, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai proses fisik, melainkan juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan membekali individu maupun kelompok masyarakat agar mampu mengenali kebutuhan, menganalisis permasalahan, mengambil keputusan, serta menentukan solusi secara mandiri. Konsep tersebut dikenal sebagai *community development*, yaitu pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Secara umum, pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan modern menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam setiap tahapan pembangunan. Untuk mencapai keberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, diperlukan pengelolaan pembangunan yang

partisipatif, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pembangunan desa maupun kelurahan menjadi salah satu penunjang utama keberhasilan pembangunan nasional, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal dan beraktivitas di wilayah desa atau kelurahan.

Namun demikian, kualitas lingkungan permukiman di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan kumuh perkotaan. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya kepadatan bangunan, keterbatasan sarana dan prasarana lingkungan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan data WHO/UNICEF, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan tingkat praktik buang air besar sembarangan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya angka penyakit berbasis lingkungan, terutama diare. Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020 masih terdapat jutaan rumah tangga di Indonesia yang melakukan praktik buang air besar sembarangan.

Permasalahan sanitasi juga masih ditemukan di Provinsi Jawa Barat, termasuk di Kota Cimahi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021, akses sanitasi layak di Kota Cimahi baru mencapai sekitar 80% dari total jumlah penduduk. Artinya, masih terdapat sekitar 20% masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak. Sebagian masyarakat masih membuang limbah domestik langsung ke sungai tanpa menggunakan septic tank. Selain itu, jumlah wilayah yang telah mencapai status Open Defecation Free (ODF) masih tergolong rendah. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu,

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana sanitasi yang memadai, termasuk pembangunan septic tank bagi masyarakat yang belum memilikinya.

Septic tank merupakan salah satu sarana penting dalam pengelolaan limbah domestik untuk menjaga kebersihan saluran air dan kesehatan lingkungan. Keberadaan septic tank dapat mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah rumah tangga secara langsung ke sungai atau saluran air. Oleh sebab itu, pembangunan septic tank menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data kepemilikan septic tank di Kelurahan Cimahi tahun 2021, diketahui bahwa masih terdapat banyak rumah penduduk yang belum memiliki septic tank. Dari total data yang tercatat, sebanyak 1.697 rumah belum memiliki septic tank, sedangkan rumah yang telah memiliki septic tank berjumlah 1.393 rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sanitasi di Kelurahan Cimahi masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, kelurahan memiliki peranan penting dalam pemeliharaan saluran air dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan. Peranan tersebut meliputi fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, kelurahan bertugas menetapkan dan menegakkan aturan terkait pengelolaan limbah domestik dan pembangunan septic tank. Sebagai dinamisator, kelurahan berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pemeliharaan saluran air. Sementara itu, sebagai fasilitator, kelurahan menyediakan akses informasi, bantuan teknis, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung pembangunan sanitasi lingkungan.

Meskipun demikian, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan program sanitasi di Kelurahan Cimahi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, serta minimnya kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya sanitasi dan pemeliharaan saluran air. Kondisi tersebut

berdampak pada belum optimalnya pencapaian target Open Defecation Free (ODF) di wilayah Kelurahan Cimahi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ini memfokuskan kajian pada seberapa besar Peranan Kelurahan dalam Pemeliharaan Saluran Air di Wilayah Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Peneliti ini mampu memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat keselarasan antara peranan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai keadaan, gejala, atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna perilaku individu maupun kelompok terhadap suatu permasalahan sosial.

Proses penelitian dilakukan melalui penyusunan pertanyaan penelitian, pengumpulan data di lapangan, analisis data secara induktif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan tema-tema yang ditemukan. Pada akhirnya, hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan yang disusun secara sistematis dan fleksibel.

PEMBAHASAN

Pada pembahasan penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai peranan Kelurahan Cimahi dalam pemeliharaan saluran air di wilayah Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepemilikan septic tank pada rumah tangga masyarakat. Berdasarkan data tahun 2021, terdapat 1.697 rumah yang belum memiliki septic tank, sedangkan rumah yang telah memiliki septic tank berjumlah 1.393 rumah. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Kondisi tersebut mencerminkan belum meratanya fasilitas sanitasi di wilayah Kelurahan Cimahi. Ketimpangan tersebut terlihat dari adanya

perbedaan jumlah rumah yang memiliki dan belum memiliki septic tank. Namun demikian, kondisi ini belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan tanpa adanya bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh perlakuan yang tidak setara atau faktor struktural tertentu, seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses informasi, maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk ketimpangan sanitasi.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, peneliti menggunakan teori peranan pemerintah menurut Rasyid yang membagi peranan pemerintah ke dalam tiga dimensi, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana Kelurahan Cimahi menjalankan peranannya dalam pemeliharaan saluran air melalui pembangunan dan pengelolaan septic tank.

Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan informan dari:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
2. Kelurahan Cimahi

1. Peranan Sebagai Regulator

Menurut Rasyid, pemerintah sebagai regulator memiliki peran dalam menyiapkan arah pembangunan melalui penerbitan peraturan serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, Kelurahan Cimahi berperan dalam mengatur dan menegakkan peraturan terkait pembangunan septic tank guna menjaga kualitas sanitasi dan pemeliharaan saluran air.

Kelurahan Cimahi menerapkan aturan mengenai kewajiban kepemilikan septic tank bagi setiap rumah atau bangunan. Selain itu, pembangunan septic tank harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah guna mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat.

a. Penerbitan Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Kelurahan Cimahi menyampaikan bahwa pembangunan septic tank mengacu pada:

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2014; dan
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah domestik.

Peraturan tersebut mengatur mengenai standar pembangunan septic tank, seperti kewajiban septic tank kedap air, memiliki ventilasi, serta jarak aman dengan sumber air bersih. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan mengurangi risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Cimahi telah menjalankan fungsi regulator dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Pemerintah kelurahan berupaya memastikan bahwa pembangunan septic tank dilakukan sesuai standar teknis agar pengelolaan air limbah dapat berjalan dengan baik.

b. Mengatur Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan

Selain menerbitkan regulasi, Kelurahan Cimahi juga menjalankan fungsi pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pihak kelurahan menyatakan bahwa mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan septic tank.

Kelurahan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti:

- pelatihan pembangunan septic tank,
- koordinasi dengan dinas terkait,
- pengawasan pelaksanaan pembangunan,
- serta sosialisasi mengenai pentingnya sanitasi yang sehat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah berupaya menjalankan fungsi regulator secara optimal. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan septic tank. Kebiasaan masyarakat yang masih membuang limbah secara tidak tepat menjadi tantangan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah Kelurahan Cimahi.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Sosialisasi yang dilakukan masih belum diikuti dengan pelatihan teknis yang merata kepada seluruh masyarakat. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pembangunan dan pemeliharaan septic tank secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik dari pihak Kelurahan Cimahi maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, telah menjalankan peran sebagai regulator melalui penerapan regulasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat serta koordinasi antar pihak yang belum optimal.

2. Peranan Sebagai Dinamisator

Menurut Rasyid, pemerintah sebagai dinamisator berperan dalam mendorong dan memelihara dinamika pembangunan melalui bimbingan, penyuluhan, dan pengarahan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peran tersebut diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pembangunan serta pemeliharaan septic tank.

a. Mendorong dan Memelihara Dinamika Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara, Kelurahan Cimahi telah berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui pembangunan septic tank, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang sehat.

Selain itu, pemerintah berupaya memotivasi masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan memelihara septic tank secara berkala. Upaya tersebut dilakukan agar kualitas sanitasi dan saluran air di wilayah Kelurahan Cimahi dapat meningkat secara merata.

b. Pelatihan Secara Intensif dan Efektif

Dalam menjalankan peran sebagai dinamisator, Kelurahan Cimahi juga melaksanakan program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat). Program tersebut dilakukan melalui:

- pelatihan pembangunan septic tank,
- praktik langsung di lapangan,
- pendampingan masyarakat,
- serta pengawasan berkala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SANIMAS membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara pembangunan dan pemeliharaan septic tank yang baik dan benar. Selain itu, program tersebut juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga sanitasi lingkungan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pelatihan masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya konsistensi kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga proses pemberdayaan berjalan kurang optimal.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan saluran air membutuhkan proses yang panjang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:

- kondisi geografis,
- faktor cuaca,
- kompleksitas teknis pembangunan,
- serta aspek sosial dan birokrasi.

Dengan demikian, peran pemerintah sebagai dinamisator pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut masih sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program sanitasi yang dilaksanakan pemerintah.

3. Peranan Sebagai Fasilitator

Menurut Rasyid, pemerintah sebagai fasilitator berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan melalui

pemberian bantuan, pendampingan, serta penyediaan akses informasi kepada masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, Kelurahan Cimahi berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan bantuan teknis, konsultasi, serta akses informasi terkait pembangunan septic tank.

a. Pemberian Bantuan Modal

Berdasarkan hasil wawancara, Kelurahan Cimahi membantu masyarakat dalam proses pengajuan bantuan pembangunan septic tank, mulai dari sosialisasi, administrasi, hingga pengawasan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi juga berperan sebagai fasilitator dengan membantu masyarakat memperoleh akses bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun program bantuan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh bantuan pembangunan septic tank. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa:

- keterbatasan akses informasi,
- rendahnya partisipasi masyarakat,
- serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

b. Menciptakan Kondisi yang Kondusif

Kelurahan Cimahi juga berupaya menciptakan kondisi yang kondusif melalui:

- sosialisasi,
- edukasi,
- koordinasi dengan pihak terkait,
- serta pendampingan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah kelurahan berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang sehat dan pemeliharaan septic tank secara berkelanjutan.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa akses informasi melalui media online maupun publikasi belum sepenuhnya optimal. Informasi yang tersedia masih bersifat umum dan belum secara spesifik menjelaskan kondisi sanitasi di wilayah Kelurahan Cimahi. Selain itu,

partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah juga masih belum merata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Cimahi telah menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan teknis, pendampingan, serta penyediaan akses informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek pemerataan informasi, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Kelurahan Cimahi telah menjalankan peranannya dalam pemeliharaan saluran air melalui tiga dimensi peranan pemerintah menurut Rasyid, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

Sebagai regulator, pemerintah telah menjalankan fungsi pengaturan melalui penerapan regulasi dan pengawasan pembangunan septic tank. Sebagai dinamisator, pemerintah melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat melalui program sanitasi berbasis masyarakat. Sementara itu, sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan bantuan teknis, akses informasi, serta bantuan pembangunan septic tank kepada masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan ketiga peranan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, koordinasi antar pihak yang belum maksimal, keterbatasan akses informasi, serta belum meratanya kepemilikan septic tank di wilayah Kelurahan Cimahi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan sanitasi dan pemeliharaan saluran air dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Assauri, S. (2008). *Manajemen Produksi dan Operasi edisi revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Heston YP. Wati NAP. *Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Pengukuran dan Berkelanjutan. Teknosain.*
- Rasyid, Riyas. 2000. *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan).* Jakarta:PT Yasir Watampone
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung:Alfabeta.
- Suripin, 2003. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan.* Andi Offset, Yogyakarta.
- Usman, Sunyonto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Jurnal :

- AW Hasbiah. 2021. *Analisis Kinerja Instalansi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Cimahi,* 2021.
- Mila Murdotilah, R. S. 2019. *Pemeliharaan Lingkungan Melalui Septiktank Komunal.* Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 5 (1) (2019):1-19.
- MV Rafianto. 2021. *Peningkatan Status Mutu Sungai Cimahi dengan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.* Vol VI, No. 2. 2021.
- Sama Savira Siddik, M. R. S. 2021. *Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Wilayah Pelayanan IPAL Regional Lagadar.* Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Vol. 13 No. 2 Hal. 104-119